

EFEKTIVITAS KOMUNIKASI ORGANISASI SEKTOR PUBLIK DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN: STUDI PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT, PROVINSI MALUKU

Pahrul Idham Kaliky¹, Beatriz B. Tanasale²

^{1,2}Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia

Email: unpatti.kaliky@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas komunikasi organisasi sektor publik dalam mendukung penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Seram Bagian Barat. Kemiskinan dipahami sebagai persoalan multidimensional yang menuntut koordinasi antarsektor, pertukaran informasi, dan keterlibatan aktor di luar pemerintahan. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan memanfaatkan data sekunder dari Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2025-2030. Data dianalisis melalui pengelompokan tematik terhadap pola komunikasi, koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah, keterlibatan masyarakat sipil, kemitraan lintas sektor, serta hambatan komunikasi yang tercermin dalam dokumen. Hasil analisis menunjukkan bahwa komunikasi organisasi sektor publik telah membentuk kerangka koordinasi internal melalui keterlibatan lintas OPD dan fungsi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah. Pola komunikasi tidak hanya bergerak secara vertikal melalui aliran informasi dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas, tetapi juga secara horizontal melalui koordinasi antarperangkat daerah yang menangani dimensi kemiskinan yang berbeda. Meski demikian, keterlibatan masyarakat masih lebih menonjol pada tahap implementasi dibandingkan pada tahap perencanaan, sehingga penguatan komunikasi eksternal dan mekanisme umpan balik publik tetap diperlukan. Efektivitas komunikasi dalam penelitian ini dipahami sebagai kemampuan proses komunikasi untuk mendukung integrasi informasi, koordinasi program, penyelarasan peran, dan partisipasi dalam penanggulangan kemiskinan, bukan sebagai hubungan kausal langsung terhadap perubahan indikator kemiskinan.

Kata Kunci: Komunikasi Organisasi, Sektor Publik, Penanggulangan Kemiskinan, Koordinasi, Partisipasi Masyarakat.

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of public sector organizational communication in supporting poverty alleviation efforts in West Seram Regency. Poverty is understood as a multidimensional issue requiring cross-sectoral coordination, information exchange, and the involvement of non-governmental actors. The study employs a qualitative descriptive approach, utilizing secondary data from the West Seram Regency Regional Poverty Alleviation Plan (2025–2030). Data were analyzed through thematic categorization regarding communication patterns, coordination among regional government agencies, civil society involvement, cross-sector partnerships, and communication barriers reflected in the document. The analysis reveals that public sector organizational communication has established an internal coordination framework through the involvement of various regional agencies and the function of the Regional Poverty Alleviation Coordination Team. Communication patterns operate not only vertically, via top-down and bottom-up information

flows, but also horizontally through coordination among agencies addressing different dimensions of poverty. However, community involvement remains more prominent during the implementation stage than in the planning stage; thus, strengthening external communication and public feedback mechanisms is still necessary. In this study, communication effectiveness is defined as the capacity of the communication process to support information integration, program coordination, role alignment, and participation in poverty alleviation, rather than as a direct causal link to changes in poverty indicators.

Keywords: *Organizational Communication, Public Sector, Poverty Alleviation, Coordination, Community Participation.*

A. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah multidimensional yang tidak dapat direduksi menjadi kekurangan pendapatan semata. Dimensi ekonomi berkelindan dengan akses pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, infrastruktur dasar, ketahanan pangan, serta kesempatan masyarakat untuk memperoleh dan menggunakan informasi. Dalam tradisi kajian kemiskinan, kemiskinan kultural menjelaskan pengaruh nilai, pandangan hidup, dan pola adaptasi yang dapat berkelanjutan di dalam komunitas, sedangkan kemiskinan struktural menempatkan keterbatasan akses dan ketimpangan struktur sosial sebagai sumber persoalan. Palikhah (2017) menunjukkan bahwa pembacaan kemiskinan kultural berkaitan dengan sistem nilai yang memengaruhi cara kelompok miskin merespons kondisi hidupnya. Perspektif struktural melengkapi penjelasan tersebut dengan menempatkan ketimpangan kesempatan, distribusi sumber daya, dan akses terhadap institusi sebagai faktor yang membentuk keberlanjutan kemiskinan.

Dalam konteks Kabupaten Seram Bagian Barat, kemiskinan tampil dalam konfigurasi yang kompleks. Dokumen RPKD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2025-2029 menggambarkan keterbatasan akses pendidikan dan kesehatan, kondisi sarana dan prasarana dasar, lambatnya pengembangan infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, kondisi geografis, serta risiko bencana sebagai bagian dari lingkungan yang memengaruhi kerentanan masyarakat. Kompleksitas tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan kemiskinan tidak dapat ditempatkan sebagai urusan satu perangkat daerah. Setiap dimensi masalah berhubungan dengan mandat organisasi yang berbeda, sehingga respons kebijakan membutuhkan integrasi informasi dan koordinasi yang dapat menyatukan tindakan antarsektor.

Posisi pemerintah daerah menjadi strategis karena pemerintah tidak hanya menjalankan fungsi administrasi, tetapi juga menghubungkan organisasi, sumber daya, program, dan masyarakat dalam satu tujuan publik. Rainey (2012) menempatkan organisasi publik sebagai bagian penting dalam pencapaian nilai dan tujuan bersama. Dalam konteks Indonesia, Marpaung dan Hendytio (2021) menegaskan bahwa komunikasi organisasi sektor publik tidak lagi memadai apabila hanya dipahami sebagai arus instruksi birokratis. Komunikasi harus menghubungkan kepemimpinan, aparatur, pemangku kepentingan, dan masyarakat dalam proses yang lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan lingkungan.

Komunikasi organisasi menjadi relevan karena koordinasi antarsektor pada dasarnya merupakan proses produksi, penyampaian, penerimaan, dan pemaknaan informasi. Ketika perangkat daerah bekerja dengan mandat, target, dan indikator sektoral yang berbeda, efektivitas kerja kolektif bergantung pada kemampuan organisasi membangun kesamaan pengertian mengenai masalah, sasaran, pembagian peran, dan tindak lanjut. Arsyah, Muchtar, dan Utami (2022) menunjukkan bahwa komunikasi antarorganisasi pemerintahan dipengaruhi oleh kemauan berkomunikasi, komitmen komunikasi, perilaku komunikasi, dan kualitas komunikasi. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan struktur koordinasi belum

otomatis menjamin bekerjanya komunikasi apabila pertukaran informasi tidak disertai komitmen dan kualitas pesan yang memadai.

Kebutuhan terhadap komunikasi yang terintegrasi semakin kuat dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan. Widodo, Febriany, dan Irfaturahmah (2021) menemukan bahwa strategi komunikasi pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan daerah membutuhkan sinergi, koordinasi, dan pengelolaan informasi lintas lembaga, bukan sekadar penyebaran pesan melalui media. Pada ranah kelembagaan penanggulangan kemiskinan, Widodo (2024) juga menekankan pentingnya keterpaduan peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, keberlanjutan program, dan dukungan data yang memadai untuk memperkuat penanganan kemiskinan. Literatur ini menegaskan bahwa komunikasi merupakan bagian dari infrastruktur koordinasi kebijakan.

Komunikasi organisasi sektor publik juga memiliki dimensi eksternal. Pembangunan yang menempatkan masyarakat hanya sebagai penerima program berisiko mempertahankan pola komunikasi satu arah. Putri dan Priyanti (2024) menunjukkan bahwa keterbukaan komunikasi pemerintah berkaitan dengan penguatan partisipasi masyarakat dalam program pembangunan. Pada konteks Maluku, Warat dan Tuanaya (2024) menemukan bahwa komunikasi vertikal, horizontal, dan diagonal berperan dalam mendorong partisipasi pembangunan di tingkat desa. Temuan Yogi, Tuanaya, dan Latuconsina (2024) di Kabupaten Seram Bagian Barat juga memperlihatkan bahwa kerja sama, konsultasi, dan koordinasi antara aktor pemerintahan lokal menjadi unsur penting dalam membangun tata kelola yang lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat.

Kajian mutakhir mengenai pembangunan menunjukkan kecenderungan serupa. Pratama (2023) menempatkan kolaborasi pemerintah dan aktor nonpemerintah sebagai mekanisme penting dalam penanganan kemiskinan. Shambodo, Zarkasi, Asri, dan Wijayanti (2025) menunjukkan bahwa komunikasi pembangunan pada program publik yang menysasar masyarakat berpenghasilan rendah bekerja melalui kombinasi pesan, saluran, partisipasi, serta keterlibatan pemerintah dan aktor nonpemerintah. Damayanti, Hastuti, dan Taskiyah (2025) juga memperlihatkan arti penting saluran komunikasi yang sesuai dengan konteks lokal dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan di daerah terpencil. Literatur tersebut memperkuat argumentasi bahwa efektivitas komunikasi tidak cukup dilihat dari tersampainya pesan, tetapi juga dari kemampuan komunikasi menciptakan keterhubungan dan tindakan bersama.

Di Kabupaten Seram Bagian Barat, kebutuhan terhadap koordinasi lintas sektor juga muncul dalam kajian yang lebih mutakhir. Bandjar dan Rosdawiyah (2025) menempatkan penguatan monitoring, evaluasi, dan koordinasi sebagai bagian penting dalam pengelolaan dokumen RPKD. Rosdawiyah dan Bandjar (2026) selanjutnya menunjukkan relevansi komunikasi partisipatif dan transparansi informasi dalam tata kelola pembangunan di Kabupaten Seram Bagian Barat. Kedua kajian tersebut tidak digunakan sebagai sumber data penelitian ini, tetapi berfungsi sebagai literatur pembanding yang memperlihatkan konsistensi kebutuhan terhadap koordinasi, partisipasi, dan keterbukaan informasi dalam konteks lokal Seram Bagian Barat.

Penelitian mengenai komunikasi pemerintah, komunikasi antarorganisasi, dan komunikasi pembangunan telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Meski demikian, masih terdapat ruang analitis untuk menjelaskan bagaimana komunikasi organisasi sektor publik bekerja secara bersamaan pada level internal pemerintahan dan pada relasi eksternal dengan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan. Riset Rasyid, Tunggal, dan Rosyidi (2020) telah memperlihatkan persoalan ego sektoral dalam perencanaan program penanggulangan kemiskinan di Sulawesi Barat. Penelitian ini melanjutkan isu tersebut dengan menempatkan efektivitas komunikasi sebagai kemampuan mengintegrasikan

komunikasi vertikal, horizontal, dan eksternal berdasarkan konfigurasi program yang tercantum dalam RPKD Kabupaten Seram Bagian Barat.

Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian diarahkan untuk menganalisis efektivitas komunikasi organisasi sektor publik dalam mendukung penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Seram Bagian Barat. Fokus analisis mencakup pola komunikasi antarperangkat daerah, keterlibatan masyarakat sipil dan sektor nonpemerintah, hambatan koordinasi, serta strategi penguatan komunikasi yang dapat dibangun dari data yang tersedia dalam RPKD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2025-2029.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan memanfaatkan data sekunder dari Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2025-2029. Dokumen tersebut diperlakukan sebagai sumber utama untuk mengidentifikasi kondisi kemiskinan, konfigurasi program, keterlibatan Organisasi Perangkat Daerah, pola koordinasi, bentuk pelibatan masyarakat, serta hambatan yang berkaitan dengan komunikasi organisasi sektor publik.

Pengolahan data dilakukan melalui pembacaan dokumen secara sistematis dan pengelompokan informasi ke dalam tema analisis. Tema utama meliputi komunikasi internal antarsektor pemerintah, aliran komunikasi vertikal, komunikasi horizontal antar-OPD, komunikasi eksternal pemerintah dengan masyarakat dan sektor nonpemerintah, serta tantangan koordinasi yang muncul dari perbedaan tugas dan prioritas organisasi. Kategori tersebut digunakan sebagai perangkat analitis untuk menafsirkan hubungan antara struktur program dan kebutuhan komunikasi dalam penanggulangan kemiskinan.

Efektivitas komunikasi dalam penelitian ini dipahami secara fungsional sebagai kemampuan komunikasi mendukung integrasi informasi, koordinasi program, kejelasan pembagian peran, penyelarasan tindakan, dan partisipasi pemangku kepentingan. Penilaian tidak diarahkan untuk membuktikan hubungan kausal langsung antara komunikasi organisasi dan perubahan angka kemiskinan. Indikator kemiskinan ditempatkan sebagai konteks masalah yang menjelaskan urgensi koordinasi lintas sektor. Pendekatan ini menjaga kesesuaian antara jenis data yang digunakan dan lingkup kesimpulan yang dihasilkan.

Analisis dilakukan melalui reduksi data, kategorisasi tematik, interpretasi hubungan antaraktor dan program, serta perbandingan dengan literatur ilmu komunikasi dan administrasi publik yang relevan. Referensi tambahan, terutama publikasi Indonesia dalam lima tahun terakhir, digunakan sebagai bahan diskusi dan pembandingan teoretis. Referensi tersebut tidak diperlakukan sebagai data empiris penelitian.

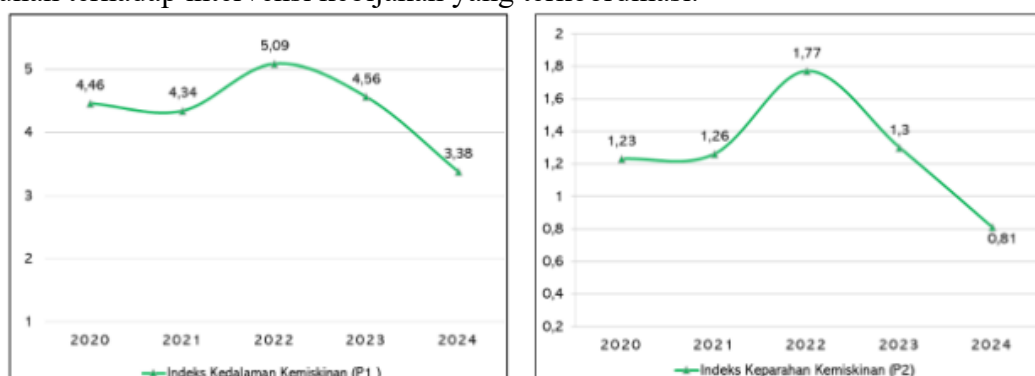
C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Kemiskinan di Kabupaten Seram Bagian Barat

Kabupaten Seram Bagian Barat menghadapi tantangan kemiskinan yang signifikan. Dokumen RPKD mencatat bahwa 22,31 persen penduduk berada di bawah garis kemiskinan pada tahun 2024. Pada tahun yang sama, garis kemiskinan tercatat sebesar Rp508.517 per kapita per bulan, meningkat dari Rp486.747 pada tahun sebelumnya. Peningkatan garis kemiskinan menunjukkan meningkatnya nilai pengeluaran minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Dalam penelitian ini, perubahan indikator tersebut tidak dibaca sebagai akibat langsung dari efektivitas komunikasi, melainkan sebagai bagian dari konteks sosial ekonomi yang melingkupi penyelenggaraan program penanggulangan kemiskinan.

Potret kemiskinan dapat dibaca melalui dimensi konsumsi dan nonkonsumsi. Pada dimensi konsumsi, Indeks Kedalaman Kemiskinan atau P1 dan Indeks Keparahan Kemiskinan atau P2 memberi gambaran mengenai jarak pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan serta distribusi pengeluaran di antara penduduk miskin. Data

RPKD menunjukkan penurunan P1 dan P2 pada tahun 2024. P1 turun menjadi 3,38 dari 4,56 pada 2023, sedangkan P2 turun menjadi 0,81 dari 1,30. Penurunan tersebut menunjukkan perbaikan pada kedalaman dan keparahan kemiskinan, namun tidak menghilangkan kebutuhan terhadap intervensi kebijakan yang terkoordinasi.



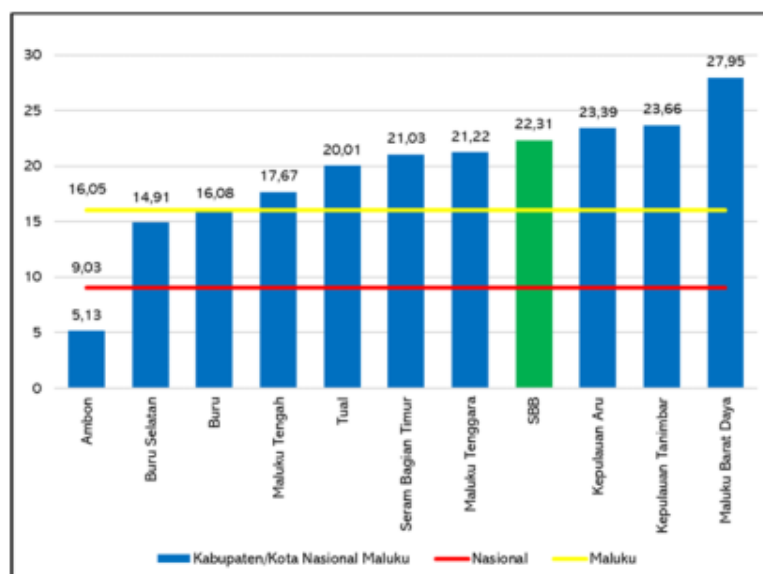
Gambar 1. Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahannya Kemiskinan Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020-2024

Sumber: RPKD Kabupaten Seram Bagian Barat, 2024

Sepanjang 2020 hingga 2024, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Seram Bagian Barat menunjukkan pola yang fluktuatif. Pertumbuhan berada pada 0,17 persen pada 2020, kemudian membaik secara bertahap dan mencapai 5,62 persen pada 2024. Perbaikan pertumbuhan ekonomi tidak serta-merta menghapus persoalan kemiskinan karena dimensi nonkonsumsi tetap memperlihatkan sejumlah kerentanan. RPKD mengidentifikasi dominasi sektor informal, rendahnya tenaga kerja formal, fluktuasi tingkat partisipasi angkatan kerja, rendahnya rata-rata lama sekolah, angka putus sekolah, kebutuhan optimalisasi imunisasi dasar, unmet need keluarga berencana, keterbatasan akses air minum dan sanitasi layak, serta persoalan stunting dan kekurangan gizi.

Persebaran penduduk miskin juga menunjukkan konsentrasi pada beberapa wilayah. Huamual tercatat memiliki 10.418 jiwa penduduk miskin, Huamual Belakang 8.307 jiwa, dan Seram Barat 7.521 jiwa. Data ini memperlihatkan bahwa kemiskinan memiliki dimensi kewilayahan dan berkaitan dengan akses terhadap layanan dasar. Konsekuensinya, penanggulangan kemiskinan membutuhkan keterlibatan OPD yang menangani urusan berbeda, mulai dari sosial, kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, pertanian, ketahanan pangan, hingga pemberdayaan ekonomi.

Posisi relatif Kabupaten Seram Bagian Barat juga menunjukkan tingkat kerentanan yang tinggi. Persentase penduduk miskin sebesar 22,31 persen menempatkan Kabupaten Seram Bagian Barat pada peringkat keempat tertinggi dari 11 kabupaten dan kota di Provinsi Maluku. Angka tersebut berada di bawah Kepulauan Aru sebesar 23,39 persen, Kepulauan Tanimbar sebesar 23,66 persen, dan Maluku Barat Daya sebesar 27,95 persen. Persentase kemiskinan Kabupaten Seram Bagian Barat lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Maluku sebesar 16,05 persen dan lebih dari dua kali angka nasional sebesar 9,03 persen.



Gambar 2. Posisi Relatif Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Seram Bagian Barat terhadap Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku dan Nasional Tahun 2024

Sumber: Dokumen RPKD Kabupaten Seram Bagian Barat, 2024

Multidimensionalitas kemiskinan tersebut memiliki implikasi komunikasi yang langsung. Ketika masalah kemiskinan tersebar pada urusan pangan, perlindungan sosial, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi, informasi yang dibutuhkan untuk menyusun dan menjalankan program juga tersebar pada organisasi yang berbeda. Komunikasi organisasi sektor publik karena itu berfungsi sebagai mekanisme integrasi. Fungsi ini sejalan dengan temuan Widodo (2024) mengenai pentingnya keterpaduan peran kelembagaan penanggulangan kemiskinan dan dengan Widodo, Febriany, dan Irfaturahmah (2021) yang menempatkan sinergi informasi dan koordinasi sebagai bagian dari strategi komunikasi pemerintah dalam penanganan kemiskinan daerah.

2. Pola Komunikasi Organisasi Sektor Publik

Komunikasi organisasi sektor publik dalam penanggulangan kemiskinan tidak cukup dipahami sebagai proses penyampaian pesan dari pemerintah kepada masyarakat. Pada tingkat organisasi, komunikasi menghubungkan struktur, fungsi, informasi, dan keputusan. Marpaung dan Hendytio (2021) menempatkan strategi komunikasi organisasi sektor publik sebagai proses yang harus mengelola relasi internal dan eksternal secara bersamaan. Perspektif ini relevan dengan struktur program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Seram Bagian Barat karena keterlibatan berbagai OPD membentuk jaringan kerja yang memerlukan arus informasi lebih dari satu arah.

Data RPKD menunjukkan tiga ranah komunikasi yang menonjol, yaitu koordinasi antar-OPD, keterlibatan masyarakat sipil, dan kemitraan dengan sektor swasta. Ketiganya menempatkan pemerintah daerah sebagai simpul yang menghubungkan kebutuhan kebijakan, distribusi tugas, informasi program, dan sasaran pembangunan. Struktur tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas komunikasi tidak dapat hanya dinilai dari keberadaan forum atau penyampaian instruksi. Efektivitas bergantung pada kemampuan komunikasi mempertemukan aktor dengan mandat yang berbeda dalam satu tujuan bersama.

Koordinasi antar-OPD menjadi prasyarat utama karena penyusunan dan pelaksanaan RPKD melibatkan perangkat daerah dengan tugas yang berbeda. Keterlibatan tersebut memungkinkan identifikasi persoalan kemiskinan didistribusikan ke dalam kerangka kerja sektoral tanpa kehilangan orientasi pada tujuan bersama. Dalam konteks ini, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah memiliki arti komunikatif karena berfungsi sebagai

ruang konsolidasi peran dan pertukaran informasi. Widodo (2024) menunjukkan bahwa efektivitas kelembagaan penanggulangan kemiskinan berkaitan dengan kemampuan TKPK menjaga keterpaduan dan keberlanjutan program.

Tabel 1. Peta Komunikasi Organisasi Sektor Publik Dalam Penanggulangan Kemiskinan

No.	Nama Program	Unsur OPD	Kegiatan
1	Program Akses Pangan Berbasis Produksi Lokal	Dinas Ketahanan Pangan Dinas Pertanian	Berkoordinasi dalam rangka penyediaan dan penyaluran bahan pangan lokal untuk rumah tangga miskin dan rentan
2	Program Bantuan Usaha Rumah Tangga	Dinas Koperasi dan UKM Dinas Perindustrian	Berkoordinasi untuk memfasilitasi bantuan peralatan usaha rumah tangga
3	Program Perlindungan Sosial yang Adaptif	Dinas Sosial BPBD	Berkoordinasi dalam penyaluran bantuan sosial tunai dan non-tunai kepada kelompok rentan
4	Program Penguatan Usaha Kecil Subsisten dan Rumah Tangga	Dinas Koperasi dan UKM Dinas Perindag	Berkoordinasi dalam peningkatan kapasitas usaha subsisten dan rumah tangga

Sumber: RPKD Kabupaten Seram Bagian Barat, 2024

Tabel 1 menunjukkan bahwa pola komunikasi dalam penanggulangan kemiskinan memiliki karakter lintas organisasi. Program akses pangan menghubungkan Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Pertanian. Program bantuan usaha rumah tangga menghubungkan Dinas Koperasi dan UKM dengan Dinas Perindustrian. Program perlindungan sosial adaptif melibatkan Dinas Sosial dan BPBD. Struktur semacam ini menuntut komunikasi yang mampu menghubungkan data, sumber daya, kewenangan, dan jadwal pelaksanaan antarsatuan organisasi.

Dalam teori komunikasi organisasi, aliran informasi dapat bergerak secara vertikal maupun horizontal. Komunikasi ke bawah atau downward communication berkaitan dengan penyampaian kebijakan, instruksi kerja, penjelasan tugas, dan arah organisasi dari tingkat yang lebih tinggi kepada pelaksana. Komunikasi ke atas atau upward communication berfungsi mengalirkan laporan, evaluasi, saran, masalah pelaksanaan, dan kebutuhan dari pelaksana kepada pengambil keputusan. Kedua pola ini tetap relevan dalam struktur pemerintahan yang hirarkis.

Data pada Tabel 1 sekaligus menunjukkan kebutuhan komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal berlangsung antara unit yang berada pada tingkat organisasi yang relatif setara tetapi memiliki fungsi berbeda. Dalam penanggulangan kemiskinan, pola ini penting karena masalah yang sama dapat menyentuh mandat beberapa OPD sekaligus. Arsyah, Muchtar, dan Utami (2022) memperlihatkan bahwa kualitas komunikasi antarorganisasi pemerintah bergantung pada kemauan, komitmen, perilaku komunikasi, dan mutu informasi yang dipertukarkan. Warat dan Tuanaya (2024) juga menekankan arti komunikasi horizontal dan multidirectional dalam tata kelola pembangunan. Dengan kerangka tersebut, koordinasi

lintas OPD di Seram Bagian Barat dapat dibaca sebagai proses komunikasi horizontal yang berfungsi menyelaraskan tindakan sektoral.

Efektivitas komunikasi horizontal menjadi penting karena spesialisasi organisasi menghasilkan diferensiasi informasi. Dinas Sosial menguasai informasi dan program yang berbeda dari Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas PUPR, atau Dinas Pertanian. Diferensiasi ini bukan kelemahan, karena setiap OPD memang dibentuk untuk menjalankan mandat tertentu. Masalah muncul ketika diferensiasi tidak diikuti mekanisme integrasi. Pada titik itu, komunikasi berubah dari aktivitas administratif menjadi mekanisme yang mencegah fragmentasi program dan ego sektoral.

Riset Rasyid, Tunggal, dan Rosyidi (2020) mengenai perencanaan program penanggulangan kemiskinan di Sulawesi Barat memperlihatkan bahwa ego sektoral dapat muncul dalam relasi antar-OPD dan dapat dikelola melalui kombinasi komunikasi formal dan informal. Temuan tersebut relevan untuk membaca konteks Seram Bagian Barat, terutama karena RPKD juga memperlihatkan pembagian program berdasarkan fungsi masing-masing OPD. Komunikasi yang efektif dibutuhkan untuk memastikan pembagian fungsi tidak berkembang menjadi isolasi sektoral.

Dimensi eksternal komunikasi terlihat pada pelibatan masyarakat dan sektor nonpemerintah. Secara konseptual, kemitraan antara pemerintah dan swasta dapat dibaca melalui kerangka public-private partnership, sedangkan keterlibatan masyarakat memperluas pola relasi menjadi kolaborasi lintas sektor. Pratama (2023) menunjukkan bahwa pengentasan kemiskinan dapat diperkuat melalui kerja kolektif pemerintah dan aktor eksternal karena kompleksitas masalah melampaui kapasitas satu institusi. Shambodo et al. (2025) juga memperlihatkan bahwa komunikasi pembangunan pada program publik yang menysasar kelompok berpenghasilan rendah membutuhkan kombinasi strategi media, komunikasi partisipatif, dan keterlibatan berbagai unsur.

Dalam data RPKD, keterlibatan masyarakat sipil muncul melalui kelompok usaha bersama dan kegiatan pemberdayaan. Pola tersebut menunjukkan bahwa masyarakat telah ditempatkan sebagai bagian dari pelaksanaan program. Meski demikian, keterlibatan masih lebih kuat pada level implementasi daripada pada level perencanaan. Perbedaan ini penting karena partisipasi implementatif tidak selalu identik dengan partisipasi komunikatif. Partisipasi komunikatif memberi ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan, memberi umpan balik, menilai relevansi program, dan memengaruhi rumusan tindakan sebelum program dijalankan.

UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional memberi dasar bagi perencanaan pembangunan yang melibatkan masyarakat melalui mekanisme berjenjang. Dalam kerangka ilmu komunikasi, pelibatan tersebut berkaitan dengan komunikasi pembangunan yang menempatkan masyarakat sebagai subjek. Putri dan Priyanti (2024) menunjukkan bahwa strategi komunikasi yang terbuka dan inklusif dapat memperkuat partisipasi masyarakat dalam program pembangunan. Yogi et al. (2024), melalui studi di Kabupaten Seram Bagian Barat, juga memperlihatkan arti kerja sama, konsultasi, dan koordinasi bagi penyaluran aspirasi dalam tata kelola lokal.

Konteks daerah terpencil memberi lapisan tambahan terhadap persoalan komunikasi. Damayanti et al. (2025) menunjukkan bahwa penguatan infrastruktur di daerah terpencil memerlukan penyesuaian saluran komunikasi, penyederhanaan pesan, dan pelibatan masyarakat. Pada konteks Maluku Tenggara, Belekubun, Rumra, Tamher, dan Oraile (2024) juga menunjukkan bahwa komunikasi organisasi pemerintah dapat bekerja melalui kerja sama dengan aktor lokal untuk mendukung tujuan pelayanan. Kedua studi tersebut memperkuat kebutuhan agar komunikasi organisasi sektor publik di Seram Bagian Barat tidak berhenti pada koordinasi birokrasi, tetapi juga peka terhadap konteks sosial dan geografis masyarakat.

Perkembangan kajian lokal yang lebih baru mendukung arah tersebut. Bandjar dan Rosdawiyah (2025) menekankan penguatan koordinasi dan kapasitas dalam monitoring dan evaluasi RPKD di Kabupaten Seram Bagian Barat. Rosdawiyah dan Bandjar (2026) memperlihatkan relevansi komunikasi partisipatif dan transparansi dalam pengelolaan informasi pembangunan di daerah yang sama. Sebagai literatur pembanding, kedua studi ini menunjukkan bahwa integrasi data, komunikasi lintas sektor, dan partisipasi masyarakat merupakan isu yang konsisten dalam tata kelola pembangunan Seram Bagian Barat.

3. Tantangan dan Strategi Peningkatan Efektivitas Komunikasi Organisasi Sektor Publik

Pengembangan komunikasi organisasi sektor publik yang konsolidatif menghadapi tantangan yang berasal dari struktur organisasi itu sendiri. Setiap OPD memiliki tugas, fungsi, indikator kinerja, dan prioritas yang berbeda. Diferensiasi tersebut diperlukan agar pelayanan publik berjalan berdasarkan pembagian kewenangan yang jelas, tetapi pada program lintas sektor diferensiasi dapat menghasilkan fragmentasi apabila pertukaran informasi dan penyelarasan tindakan tidak berjalan memadai. RPKD Kabupaten Seram Bagian Barat menunjukkan perbedaan kategori program dan kegiatan pada beberapa sektor strategis sebagaimana tergambar pada Tabel 2.

Tabel 2. Perbedaan Program dan Kegiatan pada Sektor Strategis Penanggulangan Kemiskinan

No.	Sektor Strategis	Program	Kegiatan
1	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Diversifikasi Konsumsi Pangan Program Penguatan Ketahanan Pangan Melalui Pekarangan Rumah Tangga	Edukasi dan promosi perilaku konsumsi pangan sehat dan beragam Pengembangan Pekarangan Pangan Lestari (P2L)
2	Dinas Sosial	Program Perluasan Jaminan Sosial bagi Masyarakat Miskin Program Transisi Sosial Ekonomi Keluarga Miskin	Fasilitasi kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan bagi keluarga miskin dan rentan Pendampingan sosial dan pemberdayaan ekonomi keluarga penerima bantuan sosial
3	Dinas Kesehatan	Program Desa Bebas Stunting dan Gizi Buruk Program Perluasan Layanan Keluarga Berencana Rumah Akses dan Berbasis Rumah Tangga	Layanan terpadu pencegahan stunting bagi keluarga Peningkatan akses pelayanan KB bagi kelompok perempuan usia subur di wilayah miskin dan tertinggal
4		Program Perluasan Akses Air Minum	Peningkatan akses air minum dan

ARTIKEL

No.	Sektor Strategis	Program	Kegiatan
	Dinas PUPR	dan Sanitasi untuk Keluarga Miskin	sanitasi di wilayah miskin dan terpencil
5	Dinas Pendidikan	Program Bantuan Pendidikan Program Peningkatan Akses Pendidikan	Pemberian bantuan pendidikan bagi keluarga tidak mampu Penguatan sarana dan prasarana pendidikan di daerah terpencil

Sumber: RPKD Kabupaten Seram Bagian Barat, 2024

Tabel 2 memperlihatkan bahwa penanggulangan kemiskinan dibangun melalui sejumlah jalur intervensi yang berbeda. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan berorientasi pada konsumsi dan ketahanan pangan. Dinas Sosial bekerja pada jaminan sosial dan transisi sosial ekonomi. Dinas Kesehatan berfokus pada stunting, gizi, dan layanan keluarga berencana. Dinas PUPR mengintervensi akses air minum dan sanitasi. Dinas Pendidikan menangani bantuan serta akses pendidikan. Keragaman tersebut memperlihatkan diferensiasi organisasi yang tinggi, sehingga efektivitas komunikasi bergantung pada kemampuan setiap sektor menerjemahkan program sektoral ke dalam tujuan bersama penanggulangan kemiskinan.

Tantangan pertama adalah perbedaan tujuan operasional dan prioritas kerja. Setiap OPD memiliki standar capaian sektoral yang sah, tetapi perbedaan tersebut dapat menghasilkan orientasi yang terpisah ketika ruang koordinasi tidak cukup kuat. Komunikasi horizontal dibutuhkan untuk membangun kesepahaman mengenai titik temu antarprogram. Arsyah et al. (2022) menunjukkan bahwa kualitas komunikasi antarorganisasi ditentukan bukan hanya oleh keberadaan hubungan formal, tetapi juga oleh komitmen dan perilaku komunikasi. Temuan tersebut menjelaskan mengapa rapat atau forum koordinasi secara formal belum cukup apabila tidak diikuti pertukaran informasi yang konsisten dan tindak lanjut yang jelas.

Tantangan kedua adalah risiko fragmentasi informasi. Program penanggulangan kemiskinan membutuhkan data yang berasal dari sektor berbeda. Fragmentasi informasi berpotensi menghasilkan perbedaan pemahaman mengenai sasaran, prioritas wilayah, dan bentuk intervensi. Dalam konteks ini, komunikasi berfungsi sebagai mekanisme integrasi informasi. Bandjar dan Rosdawiyah (2025) menunjukkan pentingnya monitoring dan evaluasi RPKD yang ditopang koordinasi lintas sektor. Rosdawiyah dan Bandjar (2026) memperlihatkan bahwa keterbukaan dan partisipasi dalam pengelolaan informasi pembangunan dapat memperkuat ekosistem komunikasi lokal. Literatur tersebut menguatkan kebutuhan terhadap medium bersama yang memungkinkan pertukaran informasi secara teratur.

Tantangan ketiga berkaitan dengan ego sektoral. Ego sektoral dapat berkembang ketika organisasi lebih kuat mempertahankan batas tugasnya daripada membangun irisan kerja dengan sektor lain. Rasyid et al. (2020) menemukan bahwa perencanaan program penanggulangan kemiskinan dapat menghadapi hambatan berupa ego sektoral dan membutuhkan jalur komunikasi formal serta informal untuk meredakan jarak antaraktor. Pada kasus Seram Bagian Barat, keragaman program pada Tabel 2 menunjukkan kondisi struktural yang dapat melahirkan risiko serupa apabila koordinasi tidak dikelola sebagai proses komunikasi yang berkelanjutan.

Tantangan keempat adalah ketidakseimbangan antara komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Data RPKD memperlihatkan bahwa koordinasi internal pemerintah

memiliki bentuk yang lebih eksplisit melalui keterlibatan lintas OPD dan TKPKD, sedangkan masyarakat lebih banyak muncul dalam pelaksanaan program pemberdayaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa komunikasi eksternal masih dapat diperkuat pada tahap perencanaan dan evaluasi. Putri dan Priyanti (2024) memperlihatkan bahwa komunikasi pemerintah yang terbuka dapat meningkatkan ruang partisipasi. Warat dan Tuanaya (2024) juga menempatkan komunikasi multidirectional sebagai unsur yang mendorong keterlibatan warga dalam pembangunan.

Strategi pertama yang dapat dikembangkan adalah memperkuat komunikasi horizontal lintas OPD. Penguatan ini tidak harus dimaknai sebagai pembentukan struktur baru, tetapi sebagai optimalisasi proses yang sudah tersedia. Forum koordinasi perlu bekerja sebagai ruang pertukaran informasi, identifikasi irisan program, penyesuaian jadwal, dan penegasan pembagian peran. Setiap pertemuan komunikasi sebaiknya menghasilkan kesepakatan operasional yang dapat ditelusuri kembali dalam pelaksanaan program.

Strategi kedua adalah membangun kesinambungan antara komunikasi formal dan informal. Komunikasi formal memberikan legitimasi, dokumentasi, dan kepastian prosedural. Komunikasi informal memberi keluwesan ketika koordinasi memerlukan respons cepat. Temuan Rasyid et al. (2020) mengenai dua jalur komunikasi dalam koordinasi program penanggulangan kemiskinan mendukung pentingnya kombinasi tersebut. Penggunaan keduanya tetap memerlukan batas yang jelas agar fleksibilitas tidak mengurangi akuntabilitas.

Strategi ketiga adalah memperkuat kualitas informasi. Arifin (2022) menempatkan kapasitas institusional, transparansi, koordinasi, dan kolaborasi sebagai faktor penting dalam komunikasi pemerintah. Pada penanggulangan kemiskinan, informasi harus memiliki kejelasan, relevansi, konsistensi, dan ketepatan waktu agar dapat digunakan lintas OPD. Kualitas informasi juga menentukan kemampuan pemerintah menjelaskan program kepada masyarakat secara sederhana tanpa kehilangan substansi kebijakan.

Strategi keempat adalah memperluas komunikasi partisipatif. Pelibatan masyarakat perlu bergerak dari posisi penerima program menuju posisi pemberi informasi dan umpan balik. Shambodo et al. (2025) menunjukkan bahwa komunikasi pembangunan yang menasar kelompok berpenghasilan rendah memerlukan partisipasi aktif sasaran pembangunan. Putri dan Priyanti (2024) juga memperlihatkan arti keterbukaan komunikasi bagi partisipasi. Dalam konteks Seram Bagian Barat, penguatan ini dapat dibangun melalui forum yang sudah tersedia dalam proses perencanaan pembangunan, kegiatan pemberdayaan, dan ruang interaksi pemerintah dengan kelompok masyarakat.

Strategi kelima adalah menyesuaikan saluran komunikasi dengan karakter wilayah. Daerah dengan hambatan geografis tidak selalu dapat bergantung pada saluran digital. Damayanti et al. (2025) menunjukkan bahwa komunikasi di daerah terpencil membutuhkan kombinasi saluran tradisional, penyederhanaan bahasa, dan pelibatan masyarakat. Sumarwan, Kartika, Fitria, Aprilia, dan Indriani (2024) memperlihatkan bahwa media digital dapat memperluas jangkauan komunikasi pembangunan ketika digunakan secara strategis. Kombinasi tatap muka, forum komunitas, media sosial, dan saluran administrasi dapat diposisikan secara komplementer sesuai akses masyarakat.

Strategi keenam adalah memperkuat kapasitas komunikasi aparatur dan mitra. Fatadona, Rahayu, Disman, dan Wibowo (2026) menunjukkan bahwa transformasi pemerintah daerah tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga oleh komunikasi internal, peningkatan kapasitas aparatur, dan kemampuan mengatasi resistensi serta ego sektoral. Temuan tersebut relevan bagi penanggulangan kemiskinan karena koordinasi lintas sektor membutuhkan aparatur yang mampu menjelaskan informasi, mendengarkan masukan, menerjemahkan kepentingan sektoral, dan menyusun tindak lanjut bersama.

Dengan demikian, efektivitas komunikasi organisasi sektor publik di Kabupaten Seram Bagian Barat dapat dibaca melalui kemampuan sistem komunikasi mengintegrasikan tiga ranah sekaligus. Ranah pertama adalah komunikasi vertikal yang menjamin arah, pelaporan, dan akuntabilitas. Ranah kedua adalah komunikasi horizontal yang menyelaraskan OPD dengan mandat berbeda. Ranah ketiga adalah komunikasi eksternal yang membuka ruang partisipasi masyarakat dan kemitraan lintas sektor. Ketiganya tidak berdiri sendiri. Kelemahan salah satu ranah dapat mengurangi daya integrasi keseluruhan program penanggulangan kemiskinan.

D. KESIMPULAN

Penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Seram Bagian Barat membutuhkan komunikasi organisasi sektor publik karena persoalan kemiskinan tersebar pada berbagai urusan pemerintahan. Data RPKD menunjukkan keterlibatan perangkat daerah dengan mandat yang berbeda pada bidang pangan, sosial, kesehatan, infrastruktur, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi. Kondisi tersebut membentuk kebutuhan komunikasi yang tidak hanya hirarkis, tetapi juga horizontal dan lintas sektor.

Efektivitas komunikasi terlihat dari terbentuknya kerangka koordinasi internal melalui keterlibatan lintas OPD dan fungsi TKPKD. Komunikasi vertikal mendukung penyampaian arah dan pelaporan, sedangkan komunikasi horizontal diperlukan untuk menyelaraskan program antarsektor. Pada saat yang sama, pola komunikasi eksternal dengan masyarakat masih perlu diperkuat karena keterlibatan masyarakat dalam data RPKD lebih menonjol pada tahap implementasi dibandingkan pada tahap perencanaan. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa kualitas komunikasi tidak cukup dinilai dari intensitas koordinasi internal, tetapi juga dari kemampuan pemerintah membuka ruang umpan balik dan partisipasi.

Tantangan utama komunikasi meliputi perbedaan prioritas antar-OPD, fragmentasi informasi, risiko ego sektoral, serta ketidakseimbangan antara komunikasi internal dan eksternal. Strategi penguatan dapat diarahkan pada optimalisasi komunikasi horizontal, kesinambungan jalur formal dan informal, peningkatan kualitas informasi, perluasan komunikasi partisipatif, penyesuaian saluran komunikasi dengan karakter wilayah, dan peningkatan kapasitas komunikasi aparatur. Rangkaian strategi tersebut menempatkan komunikasi sebagai mekanisme integrasi kebijakan, bukan sekadar penyampaian pesan.

Penelitian ini menggunakan data sekunder dari RPKD dan karena itu tidak dimaksudkan untuk membuktikan hubungan kausal langsung antara komunikasi organisasi dan perubahan indikator kemiskinan. Kontribusi penelitian terletak pada pembacaan proses komunikasi yang mendukung koordinasi dan integrasi program. Dengan batas tersebut, penguatan komunikasi organisasi sektor publik dapat diposisikan sebagai prasyarat kelembagaan untuk memperbaiki konsistensi kerja lintas sektor dan memperluas partisipasi dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Seram Bagian Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, B. (2022). Government communication strategies in time of pandemic: Comparative study between South Korea and Indonesia. *Policy & Governance Review*, 6(2), 189-205. <https://doi.org/10.30589/pgr.v6i2.546>
- Arsya, D. A., Muchtar, E. A., & Utami, S. B. (2022). Komunikasi antar organisasi di Pemerintah Kota Bogor dalam penyediaan informasi publik tahun 2020. *JANE: Jurnal Administrasi Negara*, 14(1), 161-169. <https://doi.org/10.24198/jane.v14i1.41288>
- Bandjar, A., & Rosdawiyah, R. (2025). Sosialisasi mekanisme evaluasi dan monitoring penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten

- Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku. *COMMUNITY: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), 656-665. <https://doi.org/10.51878/community.v5i2.7520>
- Belekubun, S., Rumra, M. T., Tamher, R. S., & Oraile, Y. Y. (2024). Peran komunikasi organisasi pemerintah Ohoi dalam meningkatkan pendidikan di Ohoi Dian Darat Kabupaten Maluku Tenggara. *CORE: Journal of Communication Research*, 2(2), 46-55. <https://doi.org/10.47650/core.v2i2.1431>
- Bulamei, E. C., Koagouw, F. V. I. A., & Runtuwene, A. (2017). Kajian komunikasi pembangunan Dinas Pekerjaan Umum dalam meningkatkan perbaikan infrastruktur Kota Manado. *Acta Diurna Komunikasi*, 6(3).
- Cangara, H. (2012). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Damayanti, A., Hastuti, P. D., & Taskiyah, E. (2025). Strategi komunikasi dalam penguatan infrastruktur di daerah terpencil. *Jurnal Ilmu Komunikasi, Administrasi Publik dan Kebijakan Negara*, 2(1), 24-32. <https://doi.org/10.62383/komunikasi.v2i1.80>
- Daud, R. F., & Novrimansyah, E. A. (2022). Strategi komunikasi pembangunan berkelanjutan berbasis kearifan lokal pada daerah wisata di Provinsi Lampung. *Independen: Jurnal Politik Indonesia dan Global*, 3(2), 13-28. <https://doi.org/10.24853/independen.3.2.13-28>
- Fatadona, H., Rahayu, A., Disman, & Wibowo, L. A. (2026). Government communication strategy in the digital era: Accelerating Indonesian local government transformation. *Jurnal Studi Komunikasi*, 10(2), 639-648. <https://doi.org/10.25139/jsk.v10i2.11817>
- Jamaludin, A. N. (2015). *Sosiologi perkotaan: Memahami masyarakat kota dan problematikanya*. Bandung: Pustaka Setia.
- Katz, D., & Kahn, R. L. (1978). *The social psychology of organizations*. John Wiley & Sons.
- Marpaung, M. P., & Hendytio, M. K. (2021). *Strategi komunikasi organisasi sektor publik: Modul Pelatihan Kepemimpinan Administrator*. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
- Moenir, A. S. (2014). *Manajemen pelayanan umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Palikhah, N. (2017). Konsep kemiskinan kultural. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 15(30), 1-17. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v15i30.1205>
- Paselle, E. (2013). Perencanaan pembangunan partisipatif: Studi tentang efektivitas Musrenbang Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara. *Jurnal Paradigma*, 2(1), 10-25.
- Prasojo, A. R., & Fauziah, L. (2015). Peran pemerintah-masyarakat dalam pembangunan Desa Sedatigede Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo. *JKMP*, 3(1), 1-116.
- Pratama, I. N. (2023). Skema pengentasan kemiskinan ditinjau dari perspektif collaborative governance di Kota Mataram. *Jurnal Komunikasi dan Kebudayaan*, 10(1), 61-77. <https://doi.org/10.59050/jkk.v10i1.221>
- Putri, Z. A., & Priyanti, E. (2024). Strategi komunikasi pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada program pembangunan di Kelurahan Karawang Kulon. *Jurnal Intervensi Sosial dan Pembangunan*, 5(2), 243-254. <https://doi.org/10.30596/jisp.v5i2.19425>
- Rainey, H. G. (2012). Organizations, politics, and public purposes: Analyzing public organizations and public management. *PS: Political Science & Politics*, 45(1), 9-16. <https://doi.org/10.1017/S1049096511001661>
- Rasyid, E., Tunggal, A. P. P. W., & Rosyidi, M. I. (2020). Model komunikasi organisasi perangkat daerah Provinsi Sulawesi Barat dalam perencanaan program penanggulangan kemiskinan Marasa. *Jurnal Riset Komunikasi*, 3(1), 70-86.
- Rohmad, Z. (2016). *Sosiologi Pembangunan*. Ombak.
- Rosdawiyah, R., & Bandjar, A. (2026). Komunikasi partisipatif dan transparansi melalui sistem satu data peta di Kabupaten Seram Bagian Barat. *COMMUNITY: Jurnal*

- Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 1019-1031. <https://doi.org/10.51878/community.v6i2.10601>
- Shambodo, Y., Zarkasi, I. R., Asri, R., & Wijayanti, T. (2025). Komunikasi pembangunan Program Sejuta Rumah pada masyarakat berpenghasilan rendah. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, 6(1), 18-27. <https://doi.org/10.36722/jaiss.v6i1.3790>
- Silalahi, U. (2004). Komunikasi pemerintahan: Mengirim dan menerima informasi tugas dan informasi publik. *Jurnal Administrasi Publik*, 3(1).
- Sufi, S. (2018). Dampak komunikasi organisasi dalam peningkatan semangat kerja karyawan di perusahaan BUMD. *Negotium: Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 1(2), 23. <https://doi.org/10.29103/njiab.v1i2.1088>
- Sumarwan, E., Kartika, T., Fitria, N., Aprilia, A. A. T., & Indriani, A. N. (2024). Instagram sebagai media komunikasi pembangunan pemerintah: Studi pemenang Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2022. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 21(2), 124-137. <https://doi.org/10.46937/21202350795>
- Ubur, H. (2011). Upaya penanggulangan kemiskinan melalui pendekatan proses: Studi kasus masyarakat Wudi Nusa Tenggara Timur. *Aspirasi*, 2(2).
- Udin, U., Handayani, S., Yuniawan, A., & Rahardja, E. (2019). Leadership styles and communication skills at Indonesian higher education: Patterns, influences, and applications for organization. *Organizations and Markets in Emerging Economies*, 10(1), 111-131.
- Warat, A. R., & Tuanaya, W. (2024). Komunikasi organisasi dalam tata kelola desa: Interaksi multiarah untuk mendorong partisipasi pembangunan. *Populis: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 19(1), 46-62. <https://doi.org/10.30598/populis.19.1.46-62>
- Widodo, A. (2024). Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dalam penanganan kemiskinan di Kabupaten Banjarnegara. *Bappenas Working Papers*, 7(3), 268-292. <https://doi.org/10.47266/bwp.v7i3.355>
- Widodo, A., Febriany, & Irfaturahmah. (2021). Strategi komunikasi pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan daerah. *Jurnal Selasar KPI: Referensi Media Komunikasi dan Dakwah*, 1(1), 83-96. <https://doi.org/10.33507/selasar.v1i1.312>
- Yogi, Tuanaya, W., & Latuconsina, N. (2024). Kepemimpinan dan konsultasi: Pola komunikasi kepala desa dengan Badan Permusyawaratan Desa di Indonesia. *Populis: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 18(2), 147-163. <https://doi.org/10.30598/populis.18.2.147-163>
- Yulianto, T. (2024). *Memahami kembali strategi pengentasan kemiskinan di Indonesia*. Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.